

## ABSTRAK

Gea Pramesti Azahra, NIM. 126103202123, Studi Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia Dengan Hukum Korea Selatan, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Amrin Nurfiени., S.ST., M.H.

**Kata Kunci** : Penyandang Disabilitas, Pemenuhan Hak, Sistem Hukum Indonesia, Sistem Hukum Korea Selatan

Latar belakang dari penelitian ini yaitu penyandang disabilitas di Indonesia sering mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak mereka, sehingga memberikan beban mental yang signifikan saat melakukan aktivitas fisik. Di negara lain seperti Korea Selatan, pemerintahannya telah mengembangkan dan menerapkan serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan subsidi bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu, pada penelitian ini dilakukan perbandingan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Korea Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Korea Selatan? 2) Bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia Dengan Hukum Korea Selatan?, 3) Bagaimana Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Untuk menganalisis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Korea Selatan, 2) Untuk menganalisis Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia Dengan Hukum Korea Selatan, 3) Untuk menganalisis Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan sumber lain seperti buku, jurnal, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, dan internet. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif untuk menganalisis perbandingan.

Hasil dari penelitian 1) Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang di suatu tempat atau suatu wilayah tertentu disebut dengan "Hukum Positif", artinya yaitu hukum yang (dipositifkan) berlaku bagi masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Terdiri dari ruang lingkup pengantar hukum Indonesia dan klasifikasi hukum, sedangkan Hukum Korea Selatan adalah kesatuan yang berbentuk republik demokratis, dimana kebebasan individu dalam mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Presiden menjabat menjadi kepala negara. Terdiri dari Hak Sipil, Hak Politik, Hak

Ekonomi dan Hak Budaya, 2) Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menurut Hukum Indonesia dengan Hukum Korea Selatan terdiri dari persamaan dan perbedaan. Persamaan dari Undang-Undang Indonesia dan Undang-Undang Korea Selatan antara lain: Persamaan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum, Persamaan Hak Pendidikan, Persamaan Hak Pekerjaan, Persamaan Hak Kesehatan, Persamaan Hak Politik, Persamaan Hak Kebudayaan dan Pariwisata, Persamaan Hak Kesejahteraan Sosial, Persamaan Hak Perlindungan serta Persamaan bebas dari diskriminasi. Perbedaan kedua Undang-Undang tersebut yaitu tidak adanya pemenuhan hak hidup, hak privasi, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keagamaan, hak keolahragaan dan hak kewarganegaraan dalam Undang – Undang Negara Korea Selatan sedangkan dalam Undang-Undang Indonesia terdapat hak-hak tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak habilitasi dan rehabilitasi, Hak Hidup Secara Mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat, Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi, dan hak pendataan antara Undang – Undang Indonesia dan Undang-Undang Korea Selatan, 3) Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh) adalah bidang studi hukum islam yang melihat masalah hukum dan legitimasi dalam konteks institusional dan sosial, sedangkan maqâshid syarî'ah dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan jangkauan hukum al Maqdsid, yang terdiri dari: (1) Maqâshid syarî'ah Umum yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan, seperti syarat dan persyaratan yang disebutkan di atas. Ulama juga menciptakan maqâshid syarî'ah baru, seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan; (2) Maqâshid syarî'ah Spesifik: berkaitan dengan bab tertentu dari hukum Islam, seperti mencegah kejahatan pada bab pidana, kesejahteraan anak pada bab keluarga, dan mencegah monopoli pada bab mu'amalah; (3) Maqâshid syarî'ah Parsial: meliputi maksud ilahi di balik teks atau hukum tertentu, seperti maksu terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maka fikih disabilitas merupakan fikih atau hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak bagi kalangan disabilitas, Hukum Islam Tentang Disabilitas. Islam memandang kondisi disabilitas bukan merupakan hukuman, namun ujian dari Allah untuk memperkuat keimanan.

## ABSTRACT

Gea Pramesti Azahra, NIM. 126103202123, Comparative Study of Fulfillment People's Rights Disability According to Indonesian Legal Perspective with South Korean Law, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor Amrin Nurfiени., S.ST., M.H.

**Keywords** : Persons with Disabilities, Fulfillment of Rights, Indonesian Legal System, System South Korean Law

The background of this study is that people with disabilities in Indonesia often experience discrimination in the fulfillment of their rights, thus giving a significant mental burden when carrying out physical activity. In other countries such as South Korea, the government has developed and implemented a series of policies and programs aimed at improving facilities for people with disabilities and increasing subsidies for people with disabilities. Therefore, in this study a comparison was made regarding the fulfillment of the rights of persons with disabilities between the Indonesian legal system and the South Korean legal system.

The formulation of the problem in this research is 1) How are the rights of persons with disabilities fulfilled according to the perspective of Indonesian law and South Korean law? 2) How are the Rights of Persons with Disabilities Fulfilled According to Indonesian Legal Perspective and South Korean Law?, 3) How are Persons with Disabilities According to Islamic Law. The aims of this research are: 1) To analyze the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities According to the Perspective of Indonesian Law and South Korean Law, 2) To analyze the Comparison of the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities According to the Perspective of Indonesian Law and South Korean Law, 3) To analyze the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities According to the Law Islam.

This type of research is library research, data collection methods by collecting data and information from various sources such as libraries and other sources such as books, journals, magazines, documentation materials, newspapers, and the internet. Data analysis technique. Data analysis techniques using deductive logic to analyze comparisons.

Results of the research 1) Indonesian law is the law that applies in the country of Indonesia at the present time in a certain place or region, called "Positive Law", meaning that it is law that (positively) applies to a certain society and at a certain time. Consisting of an introductory scope of Indonesian law and legal classification, while South Korean law is a unit in the form of a democratic republic, where individual freedom ignores public interests, government power is limited by law. The head of government is led by a Prime Minister. The president serves as head of state. Consisting of Civil Rights, Political Rights, Economic Rights and Cultural Rights, 2) Comparison of the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities according to Indonesian Law with South Korean Law consists of

similarities and differences. The similarities between Indonesian law and South Korean law include: equal rights to justice and legal protection, equal rights to education, equal rights to employment, equal rights to health, equal political rights, equal rights to culture and tourism, equal rights to social welfare, equality The right to protection and equality is free from discrimination. The difference between the two laws is that there is no fulfillment of the right to life, the right to privacy, the right to be free from stigma, the right to privacy, religious rights, sports rights and citizenship rights in the South Korean Law, whereas in the Indonesian Law there are these rights. . Apart from that, there are differences in the right to accessibility, the right to public services, the right to habilitation and rehabilitation, the right to live independently and be involved in society, the right to express, communicate and obtain information, and the right to data collection between the Indonesian Law and the South Korean Law, 3 ) Islamic Legal Theory (Ushul Fiqh) is a field of study of Islamic law that looks at legal issues and legitimacy in institutional and social contexts, while maqâshid syari'ah is divided into 3 (three) categories based on the scope of al Maqdsid law, which consists of: (1) General Maqâshid syari'ah that can be considered in Islamic law as a whole, such as the terms and conditions mentioned above. Ulama also created new maqâshid syari'ah, such as justice, universality and convenience; (2) Specific Maqâshid syari'ah: relating to certain chapters of Islamic law, such as preventing crime in the criminal chapter, child welfare in the family chapter, and preventing monopoly in the mu'amalah chapter; (3) Partial Maqâshid syari'ah: includes the divine intention behind certain texts or laws, such as the intention to reveal the truth in determining a certain number of witnesses in certain legal cases. So disability jurisprudence is Islamic jurisprudence or law which aims to protect and provide rights for people with disabilities, Islamic Law Concerning Disabilities. Islam views disability as not a punishment, but a test from Allah to strengthen faith.

## خلاصة

الناس حقوق لاستيفاء مقارنة دراسة، 126103202123. نيم، الزهرة برامبستي جيا  
،الدستوري القانون دراسة برنامج، الجنوبي الكوري القانون مع الإندونيسي القانوني للمنظور وفقاً للإعاقة  
،S.ST.، نورفيني أمرين المشرف، 2024، أجونج تولونج الحكومية الإسلامية الله رحمة علي السيد جامعة  
M.H.

النظام، الإندونيسي القانوني النظام، الحقوق استيفاء، الإعاقة ذوي الأشخاص: المفتاحية الكلمات  
الجنوبية كوريا قانون

،حقوقهم تلبية في للتمييز يتعرضون ما غالباً إندونيسيا في الإعاقة ذوي الأشخاص أن هي البحث هذا خلفية  
قامت، الجنوبية كوريا مثل أخرى بلدان وفي. البدنية بالأنشطة القيام عند كبير عقلي عبء إلى يؤدي مما  
ذوي للأشخاص المرافق تحسين إلى تهدف التي والبرامج السياسات من سلسلة وتنفيذ بتطوير الحكومة  
يتعلق فيما مقارنة إجراء البحث هذا في تم، ولذلك. الإعاقة ذوي للأشخاص المالي الدعم وزيادة الإعاقة  
الجنوبية كوريا في القانوني والنظام الإندونيسي القانوني النظام بين الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق بإيفاء  
نظر وجهة من الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق إعمال يتم كيف (1) هي البحث هذا في المشكلة وصياغة  
وفقا للإعاقة ذوي الأشخاص بحقوق الوفاء يتم كيف (2) الجنوبي؟ الكوري والقانون الإندونيسي القانون  
ذوي الأشخاص بحقوق الوفاء يتم كيف (3)، الجنوبي؟ الكوري والقانون الإندونيسي القانوني للمنظور  
الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق استيفاء تحليل (1): هي البحث هذا أهداف. الإسلامية للشريعة وفقاً للإعاقة  
ذوي الأشخاص حقوق استيفاء مقارنة تحليل (2)، الجنوبية كوريا وقانون الإندونيسي القانون لمنظور وفقاً  
والقانون الإندونيسي القانون منظور. الجنوبية كوريا وقانون الإندونيسي القانون لمنظور وفقاً للإعاقة  
الإسلام لقانون وفقاً للإعاقة ذوي الأشخاص حقوق استيفاء لتحليل (3)، الجنوبي الكوري

البيانات جمع طريق عن تكون البيانات جمع وطريقة، المكتبي البحث هو الأبحاث من النوع هذا والمواد والمجلات والمجلات الكتب مثل أخرى ومصادر المكتبات مثل مختلفة مصادر من والمعلومات الاستنتاجي المنطق البيانات تحليل تقنيات تستخدم. البيانات تحليل تقنية. والإنترنت والصحف الوثائقية المقارنات لتحليل.

أو مكان في الحاضر الوقت في إندونيسيا دولة في المطبق القانون هو الإندونيسي القانون (1) البحث نتائج وقت في و معين مجتمع على (إيجابياً) ينطبق الذي القانون أنه أي "الوضعي القانون" ويسمى، معينة منطقة الكوري القانون أن حين في، القانوني والتصنيف الإندونيسي للقانون تمهيدي نطاق من يتكون. معين وتكون، العامة المصالح الفردية الحرية تتجاهل حيث، ديمقراطية جمهورية شكل في وحدة هو الجنوبي رئيس منصب الرئيس ويتولى. الوزراء رئيس الحكومة رئيس ويرأس. بالقانون محدودة الحكومة سلطة مقارنة تتكون (2)، الثقافية والحقوق الاقتصادية والحقوق السياسية والحقوق المدنية الحقوق من تتألف. الدولة أوجه من الجنوبي الكوري القانون مع الإندونيسي للقانون وفقاً لإعاقة ذوي الأشخاص حقوق استيفاء الحقوق في المساواة: الجنوبية كوريا وقانون الإندونيسي القانون بين التشابه أوجه تشمل. والاختلاف التشابه والحقوق، العمل في المتساوية والحقوق، التعليم في المتساوية والحقوق، القانونية والحماية العدالة في والحقوق، والسياحة الثقافة في المتساوية والحقوق، المتساوية السياسية والحقوق، الصحة في المتساوية بين الفرق. التمييز من خالي والمساواة الحماية في الحق المساواة. الاجتماعية الرعاية في المتساوية الوصمة من التحرر في والحق الخصوصية في والحق الحياة في للحق استيفاء يوجد لا أنه هو القانونين. الجنوبية كوريا قانون في المواطنة وحقوق الرياضية والحقوق الدينية والحقوق الخصوصية في والحق في الحق في اختلافات هناك، ذلك عن النظر وبصرف. الحقوق هذه توجد الإندونيسي القانون في بينما العيش في والحق، التأهيل وإعادة التأهيل في والحق، العامة الخدمات على الحصول في والحق، الوصول لجمع في والحق، المعلومات على والحصول والتواصل التعبير في والحق، المجتمع في والمشاركة المستقل هي (الفقه أصول) الإسلامي القانون نظرية (3)، الجنوبي الكوري والقانون الإندونيسي القانون بين البيانات المؤسسية السياقات في والشرعية القانونية القضايا في يبحث الذي الإسلامية الشريعة دراسة مجال والذي، المقدس قانون نطاق على بناء فئات (ثلاث) 3 إلى الشريعة مقاصد تنقسم حين في، والاجتماعية

الشروط مثل ،ككل الإسلامية الشريعة في اعتبارها يمكن التي العامة الشريعة مقاصد (1) :من يتكون والملاءمة والعالمية العدالة مثل ،للشريعة جديدة مقاصد أيضاً العلماء أنشأ كما .أعلاه المذكورة والأحكام ورعاية ،الجنايات باب في الجريمة منع مثل ،الشريعة أبواب ببعض تتعلق :الخاصة الشريعة مقاصد (2) القصد تشمل :الجزئية الشريعة مقاصد (3) المعاملات؛ باب في الاحتكار ومنع ،الأسرة باب في الطفل بعض في الشهود من معين عدد تحديد في الحقيقة إظهار نية مثل ،القوانين أو النصوص بعض وراء الإلهي ذوي الأشخاص حقوق وتوفير حماية إلى يهدف إسلامي قانون أو فقه هو الإعاقة ففقه .القانونية القضايا اختبار بل ،عقوبة ليست أنها على الإعاقة إلى الإسلام ينظر .بالإعاقة المتعلقة الإسلامية والشريعة ،الإعاقة الإيمان لتقوية الله من